

## DAFTAR PUTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rienka Cipta.
- Black, Henry C. 1979. *Black's Law Dictionary*. Amerika Serikat: West Pubhllising Co.
- Budiono, Herlien. 2015. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wiganti Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chandra, S. 2005. *Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Grasindo.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendi, Bachtiar. 1993. *Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah*. Bandung: Alumni.
- Ginting, Darwin. 2010. *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis*. Jakarta : Ghalia.
- Hadisuprpto, Paulus. 2008. *Kuliah Metode Penelitian Hukum*. Semarang: UNDIP.
- Harsono, Boedi. 2012. *Hukum Agraria Indonesia*. Bandung: Djambatan.
- \_\_\_\_\_. 2007. "PPAT Sejarah Tugas dan Kewenangannya". Jakarta: *Majalah Renvoi* No.844.IV.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, Hukum Tanah Nasional. Jakarta: Djambatan.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Hukum Agraria: Sejarah Pembentukan Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- \_\_\_\_\_. 1977. *Perkembangan Hukum Tanah Adat Melalui Yurisprudensi*. Banjarmasin: Ceramah disampaikan pada Simposium UUPA dan Kedudukan Tanah-Tanah Adat Dewasa ini.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2012. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak atas Tanah*. Kencana Prenada Media Grup.

- Kartono. 1982. *Perjanjian Jual Beli*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS RI. 2016. Strategi Nasional Akses pada Keadilan (SNAK) 2016-2019. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS RI.
- Kurniati, Nia. 2012. *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Pengelolaan Tanah Negara Bagi Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta :Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Limbong, Bernard. 2012. *Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muslan, Abdurrahman.2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Masjhoen, Sri S. tanpa tahun. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mukti Fajar, ND. 2013. Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Perangin, Effendi. 1994. *Praktik Jual Beli Tanah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Perlindungan, A.P. 1984. *Komentar Atas UUPS*. Bandung: Alumni.
- Projodikoro, R. Wiryono. 1974. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung.
- Rubaie, Achmad. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Malang: Bayumedia.
- Ruchiyat, Eddy. 1994. *Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudahnya Berlakunya UUPA*. Bandung: Armico.
- Santosa, Urip. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Salim HS. 2019. *Peraturan Jabatan & Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Tanah Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sutedi, Adrian. 2006. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika)

### **Peraturan Perundang-undangan**

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah *juncto* Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pasal 1 angka 9 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pasal 10 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Penjelasan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.

Pasal 96 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 96 ayat (5) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah atau disingkat Perbakan 8 Tahun 2012.

Pasal 101 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 102 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Surat Edaran Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 640-1884 Tanggal 31 Juli 2003.

Pasal 1320 KUH Perdata

Pasal 1866 KUH Perdata.

Pasal 1867 KUH Perdata.

Pasal 1915 KUH Perdata

Pasal 1916 KUH Perdata

Pasal 1922 KUH Perdata

Pasal 1929 KUH Perdata

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

#### **Akses Data Internet**

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akta>, diakses tanggal 28 September 2018

## Lampiran 1

### DAFTAR NAMA RESPONDEN, TEMPAT DAN TANGGAL PELAKSANAAN WAWANCARA

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>                            | <b>JABATAN</b> | <b>TEMPAT<br/>WAWANCARA</b> | <b>TANGGAL<br/>PELAKSANAAN</b> |
|-----------|--|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>  | Drs, Z. Dachlan, B.Sc., SH., SE., M.Kn | PPAT           | Kantor PPAT                 | 16/12/2019                     |
| <b>2</b>  | Irsan Haeruddin Akif, SH, M.Kn         | PPAT           | Kantor PPAT                 | 17/12/2019                     |
| <b>3</b>  | Muhamad Rahman, S.Sit, M.M             | Pihak BPN      | Kantor BPN                  | 20/12/2019                     |
| <b>4</b>  | Subri, SE                              | Pihak BPN      | Kantor BPN                  | 20/12/2019                     |